

EDISI 1 - TAHUN 2019

KASUARI INOVASI



PESAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Pada Seminar tentang Hutan Tropis
di Oslo, Norwegia

MENJAGA SAGU MENJAGA HIDUP

Etnik Emeyode di Kampung Tarof

ICBE 2018

PROFIL BALITBANGDA

Papua Barat

PROVINSI KONSERVASI

Solusi Cerdas Pembangunan Berkelanjutan
di Papua Barat



PENERBIT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

PEMBINA

Gubernur Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat
Sekretaris Daerah Papua Barat

PENGARAH

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Drs. Elisa Lesnusa
Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc.
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah
Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

PELIPUTAN

Yohanis Octovianus, ST
Jimmy Tabisu
Lince Baransano, S.Si

FOTOGRAFER

Yohanis Octovianus, ST

TIM DATA

Jonal Thio, S.Pi
Rein Hallatu
Ferdinandus Hurulean, SP.
Jhon Yerisetouw, S.STP
Nita Yohana, S.Pi

EDITOR

Yance de Fretes, Ph.D
Dr. Keliopas Krey, S.Pd, M.Si.
Dr. Onasius P Matani, S.Hut., M.Sc.

LAYOUT

Tim Econusa

ALAMAT REDAKSI

Balitbangda: Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gd Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3, Arfai
Manokwari.
Website: <http://balitbangda.papubaratprov.go.id>

Salam Redaksi

Salam sejahtera untuk kita semua
Assalamualaikum Wr. Wb

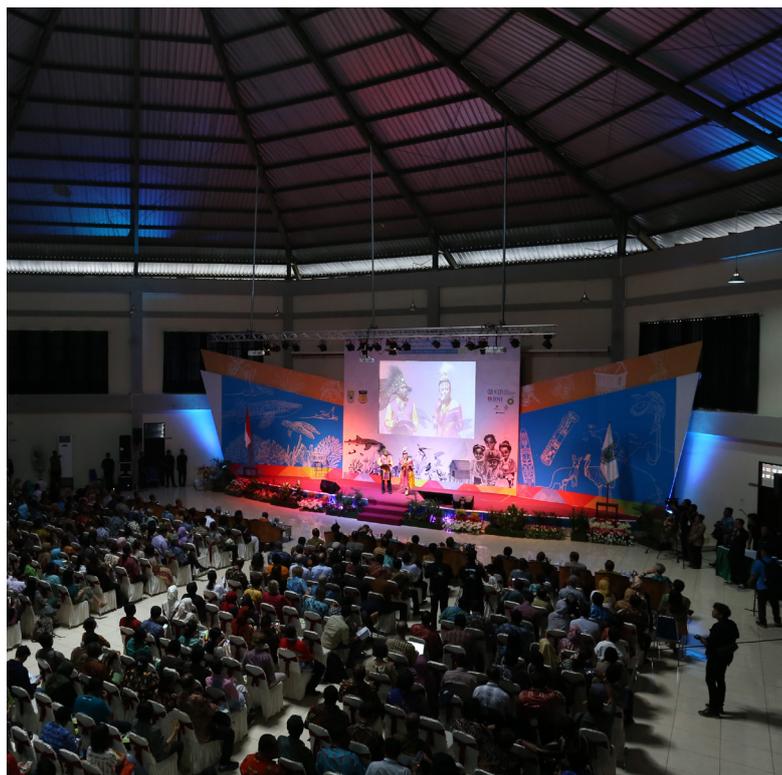
Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Papua Barat merupakan Organisasi Pengkab Daerah (OPD) yang baru dibentuk pada awal tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan ini merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi strategis penunjang urusan pemerintahan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di daerah.

Kasuari Inovasi merupakan majalah Edisi Perdana yang diterbitkan oleh BALITBANGDA Provinsi Papua Barat dalam mendeskripsikan aktifitas kelitbangan dan inovasi di Papua Barat. Majalah ini akan terbit setiap enam bulan sekali. Edisi perdana kali ini mengulas tentang kegiatan yang terkait dengan tupoksi tahun 2017 dan 2018, seperti kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dengan mitra pembangunan Papua Barat.

Topik utama edisi ini adalah konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi kreatif (International Conference On Biodiversity Ecotourism, and Creative Economy / ICBE 2018), yang telah dilaksanakan pada bulan oktober 2018. Pelaksanaan ICBE 2018, dengan mengusung Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan/provinsi konservasi dan kegiatan tentang seminar Hutan Tropis di Oslo Norwegia. Sebagai tokoh ditampilkan Profil singkat Gubernur Papua Barat. Kolom Advertorial, serba-serbi, galeri foto, sekilas tentang Science Techno Park (STP) Papua Barat dan tulisan terkait konsep konservasi menurut etnik Emeyode dan Ekoefisiensi Sumber Daya Alam Tanah Papua.

Selain itu juga ada hasil studi potensi komoditas unggulan daerah Papua Barat, Raperdasus Pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, Temuan baru: Pinang Jokowi dan kolom tentang mitra pembangunan.

Harapan kami informasi pada edisi perdana ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Semoga bermanfaat...



4 Profil Tokoh

5 Profil Gubernur Papua Barat

6 Komitmen Papua Barat dalam menjaga hutan yang berkontribusi terhadap masyarakat lokal dan global

8 Catatan dan Seminar dan Konferensi Kontribusi Hutan Papua Barat terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Global

9 Rapat Koordinasi Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Provinsi Papua Barat (2017-2018)

12 Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018)

15 Laporan Khusus

16 Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua

17 Hasil Konferensi

18 Galeri

19 Profesor Charlie D. Heatubun Perubahan Nomenklatur Provinsi Konservasi, Agar Fleksibel

20 Opini Ekofisiensi Sumber Daya Alam Tanah Papua

22 Menjaga Sagu Menjaga Hidup

24 Advertorial

25 Serba-Serbi Hinocofu, Ular Berbisa dari Keluarga Elapidae

26 Studi Potensi Komoditas Unggulan Provinsi Papua Barat

28 Rakornas Kalitbang Kemendagri

30 Penetapan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat

32 STP Papua Barat

34 Areca Jokowi, Spesies Pinang Baru dari Papua Barat

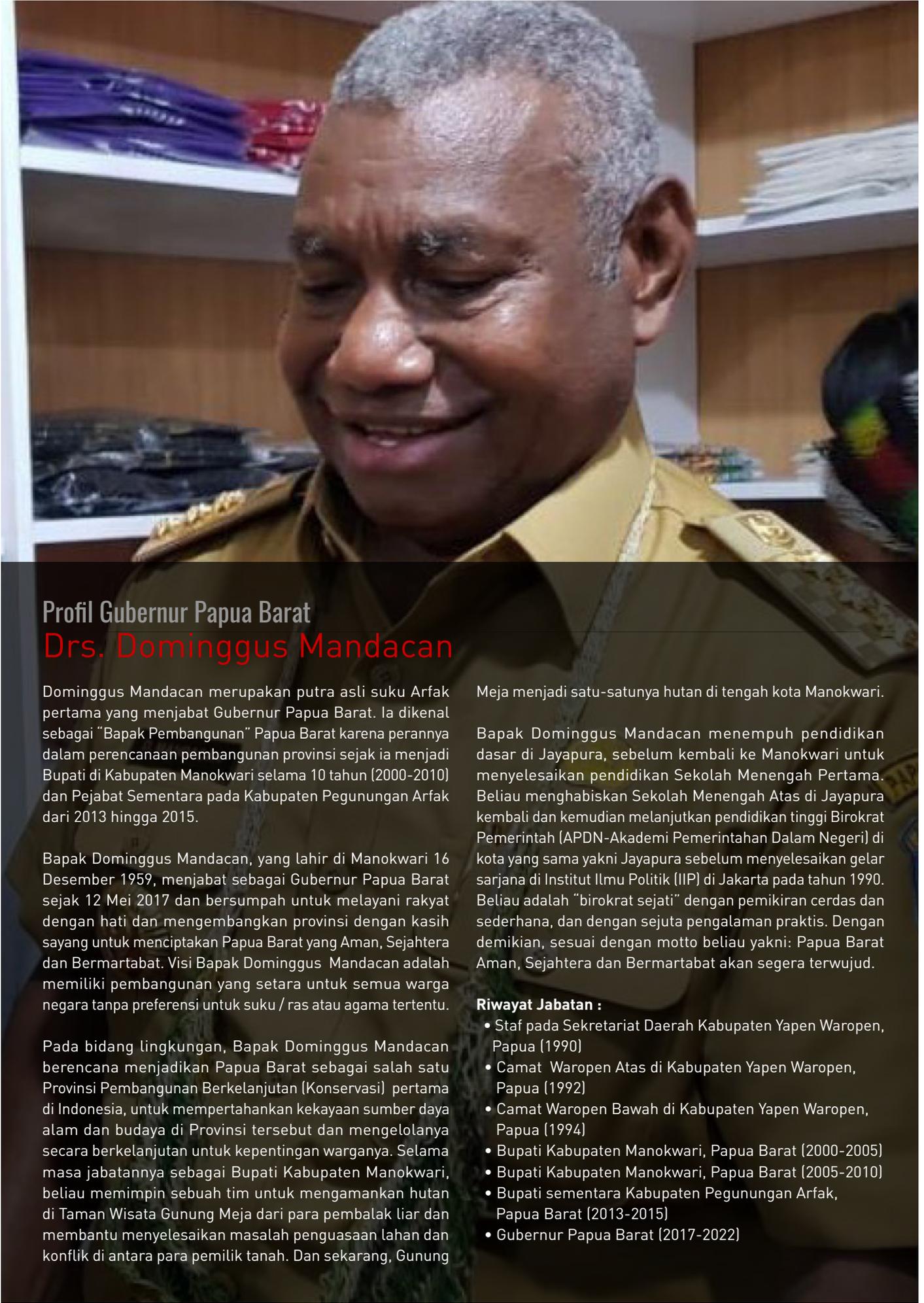
36 Inisiatif Pembentukan Mitra Pembangunan Papua Barat

38 Profil Balitbangda Provinsi Papua Barat



“Jika perjuangan hanya untuk memenuhi ego pribadi, maka kecewa dan masalah selalu saja datang. Namun jika perjuangan dilakukan karena rasa tanggungjawab dan selalu melibatkan Tuhan, maka berkat dan kebahagiaan selalu saja ada bersama kita.”

Dominggus Mandacan
Gubernur Papua Barat



Profil Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan

Dominggus Mandacan merupakan putra asli suku Arfak pertama yang menjabat Gubernur Papua Barat. Ia dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” Papua Barat karena perannya dalam perencanaan pembangunan provinsi sejak ia menjadi Bupati di Kabupaten Manokwari selama 10 tahun (2000-2010) dan Pejabat Sementara pada Kabupaten Pegunungan Arfak dari 2013 hingga 2015.

Bapak Dominggus Mandacan, yang lahir di Manokwari 16 Desember 1959, menjabat sebagai Gubernur Papua Barat sejak 12 Mei 2017 dan bersumpah untuk melayani rakyat dengan hati dan mengembangkan provinsi dengan kasih sayang untuk menciptakan Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Visi Bapak Dominggus Mandacan adalah memiliki pembangunan yang setara untuk semua warga negara tanpa preferensi untuk suku / ras atau agama tertentu.

Pada bidang lingkungan, Bapak Dominggus Mandacan berencana menjadikan Papua Barat sebagai salah satu Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Konservasi) pertama di Indonesia, untuk mempertahankan kekayaan sumber daya alam dan budaya di Provinsi tersebut dan mengelolanya secara berkelanjutan untuk kepentingan warganya. Selama masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Manokwari, beliau memimpin sebuah tim untuk mengamankan hutan di Taman Wisata Gunung Meja dari para pembalok liar dan membantu menyelesaikan masalah penguasaan lahan dan konflik di antara para pemilik tanah. Dan sekarang, Gunung

Meja menjadi satu-satunya hutan di tengah kota Manokwari.

Bapak Dominggus Mandacan menempuh pendidikan dasar di Jayapura, sebelum kembali ke Manokwari untuk menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Beliau menghabiskan Sekolah Menengah Atas di Jayapura kembali dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi Birokrat Pemerintah (APDN-Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) di kota yang sama yakni Jayapura sebelum menyelesaikan gelar sarjana di Institut Ilmu Politik (IIP) di Jakarta pada tahun 1990. Beliau adalah “birokrat sejati” dengan pemikiran cerdas dan sederhana, dan dengan sejuta pengalaman praktis. Dengan demikian, sesuai dengan motto beliau yakni: Papua Barat Aman, Sejahtera dan Bermartabat akan segera terwujud.

Riwayat Jabatan :

- Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen, Papua (1990)
- Camat Waropen Atas di Kabupaten Yapen Waropen, Papua (1992)
- Camat Waropen Bawah di Kabupaten Yapen Waropen, Papua (1994)
- Bupati Kabupaten Manokwari, Papua Barat (2000-2005)
- Bupati Kabupaten Manokwari, Papua Barat (2005-2010)
- Bupati sementara Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat (2013-2015)
- Gubernur Papua Barat (2017-2022)

KOMITMEN PAPUA BARAT DALAM MENJAGA HUTAN YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL

(Seminar Tentang Hutan Tropis di Oslo, Norwegia)

Oleh : Nita Yohana dan Elisa Lesnusa



Gubernur Papua Barat sedang menyajikan presentasi di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia

Juni 2018, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan berbicara mengenai hutan Papua dalam Seminar Hutan Tropis di Oslo, Norwegia. Kegiatan yang bertajuk Oslo Tropical Forest Forum diinisiasi oleh Badan Norwegia untuk Kerja Sama Pembangunan (The Norwegia Agency for Development Cooperation/Norad). Pada venue khusus mengenai Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia, Selasa, 26 Juni 2018, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menyatakan komitmennya untuk menjaga hutan Provinsi Papua Barat dengan luasan sekitar 9.730.550 hektar. Ia mengatakah bahwa, ekosistem hutan di wilayah Papua Barat menyimpan berbagai keanekaragaman hayati yang merupakan perpaduan unsur dari 2 wilayah bioregion, yaitu Asia Tenggara (Sundaland) dan Australia (Sahul). Tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati,

hutan Papua merupakan merupakan sumber inspirasi budaya dan kehidupan bagi masyarakat adat. Diperkirakan hutan Papua Barat menyimpan 1,323 juta metrik ton karbon. Selain itu, perairan Papua Barat juga memiliki terumbu karang asli terbaik dengan jumlah jumlah spesies ikan karang dan karang keras sekitar 75% ikan karang dan karang keras dunia. Anda pernah mendengar Raja Ampat. Ini adalah salah satu tempat dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Raja Ampat hanyalah miniatur kecil yang mewakili keanekaragaman hayati laut Papua Barat.

Dominggus Mandacan juga menyampaikan Provinsi Papua Barat siap dijadikan percontohan mekanisme pendanaan hutan dan iklim internasional yang terfokus pada daerah-daerah yang memiliki hutan alam. Untuk pendanaan dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah

nasional, negara donor, maupun swasta. Ia mengatakan pendanaan harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian hutan di provinsi dan kabupaten. Pendanaan ini juga harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat adat dalam upaya pelestarian hutan secara berkelanjutan. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Papua Barat masih belajar untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan laut secara terbatas. Ia tidak ingin anak cucu masyarakat Papua nantinya hanya mendengar cerita-cerita tentang burung surga Cendrawasih, Kasuari, dan pohon-pohon besar yang merupakan rumah leluhur. Di samping itu, ia tidak ingin Tanah Papua seperti hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan, yang tanahnya tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua



Gubernur Papua Barat sedang menyajikan presentasi di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia

Barat yang mulai menjabat pada Mei 2017 menyampaikan salah satu visi beliau adalah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, dimana sebagai anak adat ini adalah visi yang penting. Alam dan sumber daya alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi satu bagian yang utuh. Untuk hal tersebut, ia menjabarkan visi ini secara nyata dengan menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Konservasi), dengan upaya-upaya yang telah dan akan didorong melalui:

1. Meningkatkan upaya pencegahan deforestasi dengan melakukan meninjau kembali proses perijinan dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro-lingkungan dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat adat.
2. Memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting masyarakat adat.

3. Mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat.
4. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan.
5. Mengusulkan pola atau mekanisme fiskal transfer berdasarkan komitmen menjaga hutan atau luas hutan.
6. Mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat keluar Papua Barat dan sedang mengkaji ulang serta mempertimbangan untuk perlindungan total untuk ekosistem bakau di Papua Barat.
7. Memperkuat sumberdaya manusia di Papua Barat untuk memberantas illegal logging dan penegakan hukum secara luas dalam kasus pemanfaatan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

Dominggus Mandacan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Norwegia yang telah mengundang Papua Barat dalam Konferensi Hutan dan Iklim tahun ini. Dengan semangat kerja bersama, akan bisa mencapai jalan keluar terhadap

perubahan iklim yang dihadapi masyarakat global. Ia turut menyampaikan bahwa Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang harus bekerja sama untuk turut serta dalam mengendalikan perubahan iklim. Komitmen bersama masyarakat global mutlak dibutuhkan dalam memberikan aspirasi yang lebih baik terhadap menjaga hutan. Tentu saja, kami di Papua Barat berharap negara-negara donor tidak berhenti pada organisasi-organisasi pendamping atau pemerintah pusat saja, tetapi harus bisa membantu kapasitas aparat pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

Penulis:

1. Bekerja pada Yayasan EcoNusa dan Sekretariat Mitra Pembangunan Papua Barat
2. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat



Delegasi Papua Barat di Oslo Tropical Forest Forum 2018, Oslo, Norwegia. Balitbangda Papua Barat

Kontribusi Hutan Papua Barat terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Global



Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan rangkaian sedang presentasi dalam acara Seminar Oslo Tropical Forest Forum, Selasa, 26 Juni 2018. Tempo/Linda Trianita

Disela-sela pemaparan konsep pembangunan provinsi konservasi dalam seminar tentang Hutan Tropis di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia, Selasa, 26 Juni 2018. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berkomitmen menjaga hutan Provinsi Papua Barat seluas 9.730.550 hektar atau 90 persen dari luas wilayah yang seluas 143.076 kilometer. "Hutan di Papua Barat kurang lebih setara 200 kali Kota Oslo," kata Dominggus.

Pasca pendeklarasian diri sebagai provinsi konservasi pada tahun 2015. Provinsi Papua Barat julukan Kepala Burung Kasuari itu berkontribusi sebesar 8,12 persen terhadap luas hutan hujan tropis di Indonesia. Ekosistem di Papua Barat menyimpan berbagai keanekaragaman hayati dari kawasan Asia maupun Australia. Menurut Dominggus, hutan tanah Papua merupakan sumber inspirasi

budaya dan kehidupan masyarakat adat.

Lebih lanjut Dominggus mengatakan bahwa selain untuk masyarakat lokal, hutan Papua Barat juga berkontribusi terhadap masyarakat global karena menyimpan sekitar 1.320 juta metrik ton karbon. "Ini akan bermanfaat jika dijaga dengan baik," ujarnya. Tak cuma di wilayah daratan, kekayaan Papua Barat juga tersebar di wilayah perairan. Papua Barat memiliki terumbu karang dan spesies ikan sekitar 75 persen dari populasi ikan dan terumbu karang di dunia. Provinsi Papua Barat yang memekarkan diri pada 2003 itu juga memiliki 438.252 hektar mangrove atau hampir 10 kali luas kota Oslo. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat berkomitmen menjaga sekitar 25 persen area konservasi dataran dan 11 hutan lindung dengan luas 3,2 juta hektar atau 32 persen luas dataran.



Dominggus menyebutkan sekitar 17 kawasan konservasi perairan dan laut dengan luas 4,2 juta hektar. "Hampir semua kawasan ini masih dalam keadaan baik, yang merupakan sumber dan cadangan pangan yang penting bagi masyarakat Papua," kata Kepala Adat Suku Arfak itu.

Sekitar 1,1 juta penduduk Papua Barat menggantungkan diri pada sumber daya alam yang kaya tersebut. Namun, sekitar 25 persen penduduk masih terkategori miskin berdasarkan indeks pembangunan manusia.

Ironisnya lagi, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi termiskin di Indonesia meskipun hidup di tanah dengan hutan dan mineral yang kaya. "Ironi ini menjadi tantangan besar kami untuk menjaga harta kekayaan kami yang tersisa sangat besar," ujar Dominggus. [Dokumentasi Tempo.co]

*Hutan di Papua Barat

Rapat Koordinasi Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Provinsi Papua Barat (2017-2018)

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Hal ini memberikan arti bahwa kelitbang sudah seharusnya mendapatkan fungsi dan peran yang luas dalam mencapai target dan sasaran pembangunan di daerah, terutama dalam menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbang di pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten / kota di wilayahnya. Lebih lanjut kelitbang daerah juga memberikan keleluasaan dalam melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah, fasilitasi dan Inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan kelitbang serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbang di pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota. Mengingat fungsi dan tugas kelitbang Provinsi yang cukup besar sebagaimana amanat Peraturan Menteri.

Maksud pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis adalah menyatukan persepsi tentang pelaksanaan Kelitbang di Provinsi Papua Barat dan sebagai media musyawarah stakeholder Kelitbang Papua Barat untuk menjangkau isu-isu kelitbang strategis dan kebutuhan penelitian tahun 2018 yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi Papua Barat yang tepat sasaran.

Tujuannya adalah menciptakan pola kerja yang sinergis untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance), melakukan sinkronisasi agenda Rencana Kerja penelitian dan program kelitbang yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah provinsi dengan kabupaten, dan kota. Tema Rakornis Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Provinsi Papua Barat adalah :



“Bersama Membangun Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Dalam Menunjang Pembangunan Di Papua Barat”

Sedangkan narasumber terdiri dari Dr. Heriyandi Roni (Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Kepala Bidang Otonomi Daerah) dengan paparan materi “Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan di Daerah”. Prof. Dr. Ir. Roni Bawole M.Si (Universitas Papua), Scince Techno Park Provinsi Papua Barat. Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., M.Si (Kepala Badan LITBANG Daerah Provinsi Papua Barat): Meningkatkan kapasitas Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menjangkau isu-isu penelitian strategis guna mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutannya di sela-sela membuka acara rakornis Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan. M.Si mengatakan bahwa dalam

penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat selama satu dekade ini faktualnya tidak semuanya berjalan dengan mulus dan sempurna. Melihat dari dampak pembangunan yang multidimensi serta belajar dari cerita-cerita sukses (success story) dari daerah-daerah lain yang lebih maju, maka masih banyak dibutuhkan kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut yang konkrit dan konsisten untuk memecahkan masalah pembangunan yang semakin dinamis ini. Peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan mediator memiliki posisi yang sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dengan demikian, untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan isu-isu pembangunan yang mengemuka maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan semestinya akan menjadi sangat penting dan strategis. Sudah saatnya peran berbagai institusi kelitbang segera dikedepankan sebagai sumber penyedia berbagai rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan.



Dari hasil-hasil kelitbang inilah diharapkan dapat lahir berbagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus.

Sejak dibentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, telah melaksanakan kegiatan rakornis kelitbang selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan tahun 2018.

Pada tahun 2018, Rapat Koordinasi Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan di Manokwari pada tanggal 10 April 2018 yang memuat beberapa Agenda penting Balitbangda di Papua Barat, yakni:

1. Konsolidasi dan peningkatan kapasitas internal organisasi Balitbangda.
2. Akselerasi, hamonisasi, sinkronisasi TUPOKSI Balitbangda dengan OPD lainnya.
3. Inventarisasi potensi sumberdaya kelitbang Papua Barat (Stakeholders).
4. Bentuk konsorsium litbang di Papua Barat.
5. Penyusunan Roadmap/Masterplan Litbang di Papua Barat.
6. Penyusunan Raperda mengenai litbang di Papua Barat.
7. Setting up database Litbang di Papua Barat dan Infrastruktur Litbang.

8. Peningkatan kapasitas sumberdaya kelitbang di Papua Barat (Stakeholders).
9. Kaji isu aktual Papua Barat (Otsus, provinsi Konservasi, Model Pemberdayaan Masyarakat adat, Komoditas Lokal Unggulan).
10. Fasilitasi pengembangan Science Techno Park (STP).
11. Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE).
12. Publikasi, diseminasi, dan Penerapan hasil-hasil litbang di Papua Barat.

Rakornis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2018 menghasilkan beberapa rumusan penting untuk ditindak lanjutin selanjutnya. Berikut hasil rumusannya:

- Rapat koordinasi teknis Kelitbang tahun 2019 akan dilaksanakan selama 1. 2-3 hari dengan memperhatikan waktu, materi dan peserta Rakornis tahun 2019 akan ditambah dengan penguatan materi berupa gelar teknologi dan inovasi daerah oleh semua elemen kelitbang di daerah, perguruan tinggi, kementerian terkait dan mitra kerjasama pembangunan Provinsi Papua Barat. Dibutuhkan penguatan data base kelitbang yang dimulai dengan 2. penyusunan direktori dari semua kemitraan.

3. Mendorong penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil riset.
4. Mendorong penataan sistem Kelitbang dan Inovasi Daerah yang mencakup Pemantapan kelembagaan, Penguatan regulasi dan tata laksana, Penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia serta Peningkatan kualitas program dan penganggaran.
5. Mendorong perumusan program kelitbang yang mendukung implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
6. Dalam rangka penataan sistem Kelitbang di Papua Barat Mendorong pembuatan Perdasus kelitbangdan.
7. Mendorong pembentukan OPD Balitbangda di Kabupaten Kota se Provinsi Papua Barat.
8. Riset-riset yang dilakukan oleh Litbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota diprioritaskan pada komoditas lokal.
9. Pembangunan berkelanjutan berbasis Provinsi Konservasi perlu diikuti dengan riset.
10. Mendorong hilirisasi produk lokal sampai pada proses.
11. Mendorong sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan pengkajian oleh Balitbangda, Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan di Provinsi Papua Barat.
12. Rakornis Balitbangda Provinsi Papua Barat Tahun 2019 akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari.

Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018

Akhir tahun lalu, Pemda Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan mitra pembangunan berhasil melaksanakan sebuah konferensi internasional yang membahas tentang kekayaan hayati Tanah Papua, potensi dan pengembangan ekowisata serta pengembangan ekonomi kreatif, atau yang kita kenal ICBE (International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy).

Propinsi Papua Barat dan Papua

Tanah Papua yang merupakan wilayah sebelah Barat Pulau New Guinea, dan secara administratif terbagi dalam dua Pemerintahan Provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan luasan 319.036 km² dan Provinsi Papua Barat dengan luasan wilayah 140.376 km². Tanah Papua diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa, diantaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta gletser tropis.

Keanekaragaman hayati Tanah Papua adalah setengah dari total jumlah keanekaragaman hayati Indonesia, secara khusus flora dan fauna endemik yang hanya dijumpai di Tanah ini. Berdasarkan informasi sampai saat ini, Tanah Papua dihuni oleh 15.000 - 20.000 spesies tumbuhan (dimana sekitar 55% adalah endemik) termasuk sekitar 2.000 spesies anggrek, burung 602 spesies (52% adalah spesies endemik), mamalia 125 spesies (58% spesies endemik), dan herpetofauna (reptilia dan amfibia) 223 spesies (35% spesies endemik), 25 spesies ikan air tawar dan 1200 spesies ikan laut, serta diperkirakan 150.000 spesies serangga. Tidak hanya itu, Tanah Papua juga kaya akan sumberdaya alam berupa bahan tambang migas dan mineral serta adat istiadatnya.

Tercatat ada sekitar 265 bahasa lokal yang melambangkan suku-suku yang ada dengan beragam kearifan lokalnya dan menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi hijau, biru dan jingga atau ekonomi berkelanjutan berbasis lahan, laut dan kreativitas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Tanah Papua yang begitu kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kemiskinan termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menempati posisi dua terendah dalam pemeringkatan indeks pembangunan



Konferensi ini sebenarnya lanjutan dari konferensi yang sama dan pernah dilakukan di Jayapura, Provinsi Papua, pada tahun 2016. Perbedaannya, ICBE 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Oktober 2018, di Manokwari lebih memusatkan konferensi untuk memperkenalkan gagasan pencetus Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi atau Provinsi Pembangunan Berkelanjutan

dan menghimpun berbagai masukan dan saran guna penerapan Provinsi Konservasi ini. Perbedaan lainnya, pembahasan materi dan target konferensi lebih banyak dilaksanakan lewat rapat-rapat koordinasi teknis antara para mitra, pemerintah, mitra pembangunan dan lembaga donor; sehingga pelaksanaan konferensi hanya untuk membahas dan selebrasi capaian yang telah dilaksanakan sebelum konferensi.



manusia (IPM). Pengembangan ekonomi di Tanah Papua sedang dan terus akan dipacu untuk meningkatkan perekonomian dan membiayai kegiatan pembangunan dengan harapan bahwa lewat kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan harapan hidup masyarakat.

Belum berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebagai modal utama pengembangan ekonomi. Ini bisa dilihat kontribusi berbagai sektor perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan demikian, setiap usaha peningkatan perekonomian akan berdampak langsung pada tekanan pemanfaatan sumberdaya alam. Pembelajaran dari berbagai daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terencana dengan baik, tidak akan berlangsung lama, serta mengancam kelestarian alam dan manusia, dan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tertentu.

Fenomena ini bisa dilihat di Tanah Papua (termasuk di Provinsi Papua Barat), walaupun ada kemajuan nyata dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan itu belum sejalan dengan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bahkan telah menimbulkan beberapa kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta bencana. Menyikapi hal tersebut, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi pada 19 Oktober 2015, yang bertujuan agar kegiatan

pembangunan di Provinsi Papua Barat harus selalu mempertimbangkan: pertama, perlindungan lingkungan demi menjamin kehidupan masyarakat; kedua, perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati; ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan; dan keempat, pemulihan lingkungan hidup yang telah terdegradasi. Dapat disimpulkan Provinsi Konservasi bertujuan untuk menjamin pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumberdaya alam guna menunjang kehidupan masyarakat, yang tidak lain adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Secara khusus konferensi ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan Pemda Provinsi Papua Barat mengenai latar belakang Deklarasi Provinsi Konservasi, kekayaan hayati dan ekosistem Papua Barat dan berbagai usaha perlindungannya; memperkenalkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan menggalang kerjasama guna pelaksanaan Provinsi Konservasi (Provinsi Pembangunan Berkelanjutan).

Pelaksanaan Konferensi.

Persiapan pelaksanaan ICBE dimulai pertengahan Agustus 2017 dan dikoordinasi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. Tim utama terdiri dari 13 orang yang terdiri dari staff Pemda Provinsi Papua Barat, dosen Universitas Papua dan mitra (LSM) yang bekerja di Papua Barat.

Kegiatan persiapan meliputi penyusunan acuan konferensi, termasuk lokasi dan materi konferensi; kegiatan kerjasama dan penggalangan dana, serta kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi Papua, lembaga donor dan kedutaan negara sahabat.

Kegiatan penggalangan dana dilakukan secara online dan pertemuan langsung dengan beberapa donor di Manokwari maupun di Jakarta. Penggalangan dana dilakukan secara individual maupun secara kolektif dan dimulai November dan Desember 2017. Pertemuan juga dilaksanakan dengan calon vendor yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan konferensi.

Sosialisasi dan koordinasi ke Kementerian terkait dan menindaklanjuti kegiatan fundraising dilaksanakan Januari-Mei 2018. Kementerian utama yang dihubungi adalah Kantor Sekretariat Presiden, Kemenko Maritim, Bappenas (Papua Desk), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lainnya.

Berbeda dengan konferensi atau pertemuan lainnya, ICBE 2018 menetapkan 10 target utama konferensi. Diharapkan dengan penetapan target-target konferensi ini, ICBE 2018 dapat memberikan kontribusi nyata dalam persiapan pelaksanaan Provinsi Konservasi atau Pembangunan Berkelanjutan. Target-target tersebut meliputi:

1. Mendorong penyelesaian legalisasi Peraturan Khusus (Perdasus) Penetapan Propinsi Papua Barat sebagai Propinsi Konservasi.
2. Melakukan Revisi Tata Ruang Propinsi Papua Barat.
3. Mendorong peninjauan kembali proses pemberian ijin konversi hutan alam.
4. Deklarasi daerah konservasi baru atau perubahan status lindung agar dapat dikelola secara aktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Menjajaki kemungkinan pendanaan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di Papua Barat.
6. Mengusulkan dan menetapkan Peraturan Khusus Pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
7. Menyusun pembuatan dan menyetujui rencana pengembangan ekonomi hijau Papua Barat.
8. Penandatanganan MoU antara Pemda Papua Barat dan Papua untuk mendorong Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendirian museum sejarah alam di Manokwari.

9. Penandatanganan MoU antara Pemda Propinsi Papua Barat, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan Konservasi di Papua Barat, dan Kesepuluh.
10. Mengusulkan mekanisme dan rumusan baru proses pengalokasian dana yang memperhatikan luas kawasan hutan atau Konservasi yang ada di tiap kabupaten.

Mengusulkan mekanisme dan rumusan baru proses pengalokasian dana yang memperhatikan luas kawasan hutan atau Konservasi yang ada di tiap kabupaten. Pembukaan Konferensi dilaksanakan di Gedung PKK, Kantor Gubernur Papua Barat, pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018. Pembukaan ini konferensi dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Drs. Domingus Mandacan bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, staff khusus presiden dan forum Kompinda Pemda Papua Barat. Dalam acara pembukaan dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

1. Raperdasus Penentuan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Provinsi Konservasi) dan Raperdasus Pengakuan Hak Masyarakat Adat Papua dari Gubernur Papua Barat ke Ketua DPRD Papua Barat.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Papua Barat, antara Pemerintah Papua Barat, Lab Ornithology Cornell University, dan Royal Kew Botanical Garden.

3. Penyerahan plakat pinang Mandacan (*Areca mandacani*) dari peneliti kepada Drs. Domingus Mandacan; pengumuman pemberian nama spesies anggrek baru untuk Ibu Iriana Joko Widodo (*Bulbophyllum irianae*) dan Ibu Yuliana Adolina Kiriweno-Mandacan (*Bulbophyllum adolinae*) serta penyerahan plakat Anggrek Adolinae kepada Ibu Yuliana Adolina.
4. Penyerahan kartu BNI TapCash seri *Bulbophyllum adolinae* oleh perwakilan Bank BNI ke Ibu Yuliana Adolina Kiriweno Mandacan.

Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan penanaman Pinang Jokowi (*Areca jokowi*) dan Pinang Mandacan (*Areca mandacani*) di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, pembukaan Pameran Pembangunan, Festival Kuliner dan Budaya Seni Papua ke 6, serta Pemutaran Film Provinsi Konservasi.

Panitia mencatat sekitar 1027 peserta, baik dari Indonesia maupun manca negara (Inggris, Norwegia, Belanda, Amerika, Jerman, Philipina, Australia, Thailand). Latar belakang peserta yakni dari pemerintah pusat, Kedutaan-kedutaan besar negara sahabat, pemerintah daerah, peneliti dan lembaga penelitian, organisasi lingkungan hidup dan kemasyarakatan, staff dan perwakilan perusahaan, praktisi, akademisi, masyarakat adat dan gereja. Pembukaan ICBE 2018, dilaksanakan serentak dengan Pembukaan Festival Seni dan Budaya ke 6 Papua Barat, dan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat.





Penandatanganan Deklarasi Manokwari oleh: Prof. Dr. Charlie D. Heatubun (Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat) disaksikan oleh Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, dan perwakilan Polda.

Acara ini dihadiri sekitar lebih dari 500 orang. Pameran dan festival budaya berupa tari-tarian dalam rangka konferensi ICBE 2018, digelar di halaman perkantoran gubernur Papua Barat di Manokwari.

Ada sekitar 97 topik pembicaraan yang dilaksanakan dalam ICBE 2018, pembicara berasal dari Pemerintahan Pusat (KLHK, KKP, BAPPENAS, Kementerian Pertanian), Pemerintah Daerah (Papua Barat dan Papua), Kedutaan Besar Inggris dan

Kedutaan Besar Norwegia, Kepolisian Republik Indonesia, akademisi, praktisi lingkungan maupun sosial, organisasi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, perusahaan (BNI, PT. Freeport Indonesia, BP-Tanggung, SKK- MIGAS), perwakilan masyarakat adat, dan tokoh agama. Sekitar 79% pembicara berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat serta pembicara dari nasional dan luar Papua, termasuk 21% pembicara dari luar negeri. Topik pembicaraan meliputi biodiversiti

dan konservasi (29%) dan pembangunan berkelanjutan (24%), ekonomi dan ekowisasi (23%). Penyampaian materi dilaksanakan dalam 2 bentuk: pleno dan parallel.

Pleno membahas isu atau topik utama yang kemudian pembahasan detail dilaksanakan dalam sesi 3-4 sesi parallel. Selama ICBE 2018 ada 8 sidang pleno dan 10 sesi parallel, ditambah 3 lunch seminar.

Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua



DEKLARASI MANOKWARI

Berdasarkan hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan Visi Bersama Tanah Papua yaitu:

Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat

Sebagai implementasi visi bersama tersebut, hasil-hasil konferensi ICBE 2018 menyatakan:

1. Menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi atau peninjauan RTRW Papua dan RTRW Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K, dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat dengan mengintegrasikan wilayah masyarakat adat, penguatan implementasi Visi 2100 Provinsi Papua dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua yang berkelanjutan dan kontekstual Papua.
2. Berkomitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalui Perdasus Provinsi dan Perda Kabupaten yang mengakui keberadaan masyarakat adat, nilai budayanya, wilayah adat dan tata kelola dan kelembagaannya, termasuk di dalamnya wilayah hutan dan perairan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatan berkelanjutan. Pembiayaan pemetaan wilayah adat dan mendorong pembentukan tata layanan pendaftaran tanah-tanah masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat.
3. Berkomitmen kuat untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.
4. Bersama dengan pemerintah pusat berkomitmen untuk mengatur skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis, yang ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan, kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota baik melalui DAU, DAK, DID, Dana Otsus, dan/atau Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, serta mempercepat Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan implementasinya.
5. Berkomitmen untuk segera membentuk Komisi Informasi Papua Barat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi melalui peningkatan sistem informasi yang terintegrasi, baik secara lokal maupun lintas sektor termasuk dengan pusat.
6. Berkomitmen untuk mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua yang menunjang upaya konservasi dan penampungan koleksi, penelitian dan peningkatan pemahaman dan apresiasi tentang keanekaragaman hayati dan alam dan budaya Papua.
7. Berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan, termasuk masyarakat adat dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan penting untuk mendukung proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, manajemen kawasan lindung, ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan serta mengembangkan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
8. Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi untuk kemudian dikelola oleh masyarakat adat dengan dukungan akses pasar dan pendanaan atau pembiayaan yang sesuai.
9. Mendorong pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan sesuai amanat pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses pemanfaatan oleh masyarakat adat yang juga menjadi amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua provinsi juga berkomitmen mendorong adanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua

melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana diamanatkan oleh INPRES 9/2017.

10. Berkomitmen untuk menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi daratan, perairan baru di Tanah Papua, kawasan konservasi esensial, pengelolaan mangrove, rawa gambut, rawa sagu, penetapan kawasan strategis setempat, perlindungan sumber daya genetic dan spesies endemik dan terancam punah dan perlindungan kawasan karts serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan yang memiliki legalitas agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11. Berkomitmen untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun dan memfokuskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan antara kampung, distrik, dan kabupaten yang mendekati Orang Asli Papua (OAP) dengan layanan dasar dan pasar lokal.
12. Berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan Peraturan Gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah, DPR, MRP, dan Masyarakat Adat.
13. Mendorong kemitraan global, nasional dan lokal serta membentuk platform multipihak untuk mendorong terbangunnya model-model investasi/ pembiayaan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
14. Melanjutkan kerja sama yang telah terbangun antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kedua provinsi berkomitmen untuk meningkatkan peran dan pengembangan kapasitas perempuan dalam diskusi dan kerja-kerja tentang hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Tanah Papua.

Demikian deklarasi ini kami buat untuk memandu kita semua dalam bekerja bersama dalam mewujudkan visi "Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat".

Manokwari, 10 Oktober 2018

PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA

PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

LUKAS ENEMBE, S.IP., MH
Gubernur

Drs. DOMINGGUS MANDACAN
Gubernur

Hasil Konferensi

Selain menghasilkan Deklarasi Manokwari, Konferensi ICBE 2018 juga menghasilkan beberapa penandatanganan Nota Kesepahaman yakni:

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua, antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Pengembangan, dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat antara Pemerintahan Provinsi Papua Barat dengan Universitas Gadjadara.
3. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Papua Barat, antara Pemerintah Papua Barat, Lab Ornithology Cornell University, dan Royal Kew Botanical Garden UK.
4. Komitmen Pemda Papua Barat untuk merevisi tata ruang dengan target utama menentukan minimal 70% luas dataran Papua Barat dalam fungsi lindung dan konservasi.
5. Konsep usulan formulasi penetapan DAK/DAU yang memperhitungkan luas kawasan hutan dan laut, serta kawasan konservasi yang berada dalam kawasan.
6. Rancangan peraturan khusus (Raperdasus) Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, serta Raperdasus Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat.



Deklarasi Manokwari merupakan pernyataan 14 butir komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat serta para pihak terkait mengenai pembangunan dan pelestarian alam di Papua Barat dan Papua, termasuk komitmen untuk memperhatikan peran dan tanggungjawab masyarakat asli Papua. Saat ini Balitbangda dan Mitra Pembangunan Papua Barat sedang mempersiapkan tindak lanjut dari ICBE 2018, terutama untuk penyelesaian Raperdasus Pembangunan Berkelanjutan; Revisi Tataruang; Kerjasama Provinsi Papua dalam peningkatan kapasitas dan pembangunan museum sejarah alam; mendorong pembangunan ekonomi hijau; pelaksanaan dana berkelanjutan; serta pembentukan Forum Mitra Pembangunan Papua Barat.



1

Penyerahan cendramata Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH, M.Si kepada salah satu peserta ICBE 2018.



2

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.



3

Rapat Koordinasi Teknis Pertama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018).



4

Penanaman Pinang Jokowi (Areca jokowi) di halaman Kantor Gubernur Papua Barat dalam rangkaian seremonial Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan disaksikan oleh Duta Besar Norwegia, Perwakilan Kedutaan Inggris, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Papua, Ketua Panitia ICBE 2018, serta forum Kompinda Papua Barat.

Profesor Charlie Heatubun

Perubahan Nomenklatur Provinsi Konservasi, Agar Fleksibel



“Nomenklatur untuk Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi harus kita rubah. Perdasus Provinsi Konservasi dirubah menjadi Raperdasus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.”

Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat bakal merubah nomenklatur Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Perubahan nomenklatur tersebut untuk mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, dan investasi.

Rencana perubahan nomenklatur provinsi Papua Barat itu tertuang dalam rekomendasi yang dihasilkan pada Rakornis II International Konverance on Biodiversity Ecotourism and Creative Economy (ICBE) In Papua di Manokwari, Kamis (26/7).

“Nomenklatur untuk Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi harus kita rubah. Perdasus Provinsi Konservasi dirubah menjadi Raperdasus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat”. Ucap Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Charlie Heatubun Usai menutup Rakornis II ICBE In Papua.

Charlie mengemukakan dua alasan utama perubahan nomenklatur Provinsi Konservasi, yakni soal kewenangan penetapan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, kedua, soal tafsiran kata konservasi.

“Di negara ini, yang berwenang menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan Konservasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat yakni di kementerian LHK dan KKP. Alasan kedua, kita tidak mau menimbulkan multitafsir bagi masyarakat,” ungkapny.

Menurut Charlie, Istilah konservasi dapat ditafsirkan sebagai pelarangan oleh masyarakat adat, maupun oleh para Bupati dan Wali Kota terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam.

“Padahal kan kita juga butuh investasi tetapi investasi yang ramah lingkungan. Jadi hal-hal yang perlu kita hindari dari suatu regulasi yang kemudian akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” terangnya. Hasil Rakornis tersebut merekomendasikan revisi Perdasus Provinsi Konservasi dan diajukan kepada DPRD Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat dan Pemerintah Pusat.

“Terkait isinya, kita sederhanakan dan perubahan-perubahan sedikit pada isi, alur berfikir, kerangka berfikir dan konsideran yang dibangun di regulasi tersebut. kita harus berfikir bahwa regulasi ini keluar, nomenklatur atau statusnya adalah peraturan daerah khusus bukan Peraturan daerah Provinsi (Perdasu),” ujarnya.

Perubahan nomenklatur Provinsi Konservasi lanjut Prof Charlie untuk mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat yang dirumuskan secara umum. Sementara hal-hal yang bersifat khusus dan terperinci akan dibuatkan regulasi turunannya.

“Regulasi sektoral, misalnya seperti perkebunan, perikanan dan kehutanan, itu nanti dibawa regulasi ini. Atau berada di peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Gubernur yang lebih detail lagi, yang penting aturan ini kan lebih flesibel,” pungkasnya.

[Dok. Balitbangda Papua Barat].

Ekoefisiensi Sumber Daya Alam Tanah Papua

Pemikiran Kontekstual bagi Manifestasi Ekologi Non Antroposentris

Oleh : Dr. Keliopas Krey, S.Pd, M.Si

SUMBER DAYA ALAM (SDA)



Kecerdasan Manusia menggunakan ruang atau sebuah situasi kritis?.

Jika manusia cerdas maka tugas-tugas sederhana yang diorganisasi oleh saraf pusat otak kita mestinya tidak menggagalkan tujuan penciptaan manusia di bumi ini yakni melestarikan alam ciptaan Sang Ilahi. Sejak dahulu kala manusia telah diperhadapkan dengan situasi kritis. Kehidupan dan kematian manusia awalnya ditentukan oleh kemampuan ruang mereka, seperti membuat perlindungan dengan cepat atau membuat tombak dari gigi hewan, membaca tanda-tanda alam (ruang) dan membuat prediksi badai, hujan, banjir, hingga waktu yang tepat memulai menanam. Meski demikian, kini hampir semua orang melakukan kemampuan ruang untuk melakukan tugas-tugas sederhana seperti: mencuci piring, membersihkan rumput di halaman, meratakan jalan, menampung dan membakar sampah bahkan menandai habitat bermain burung.

Ini semua adalah tugas-tugas sederhana yang sebenarnya membutuhkan banyak kemampuan otak.

Marilah kita memulai dengan anggapan bahwa semua spesies memiliki nilai di dalam dan dari dirinya sendiri, dan manusia tidak berhak untuk mengurangi kekayaan ini karena kegiatan politik, ekonomi, teknik, struktur ideologi, budaya dan seni. Gambut, mangrove, pantai, tanjung, telaga, riparian, rawa, hutan sagu, goa, kebun, lembah, bukit, gunung hingga halaman rumah kita adalah sebuah ruang. Seluruh spesies hidup maupun fosil dari 5 Kingdom mulai dari Monera, Protista, Animalia, Tumbuhan, dan Fungi ada dalam ruang-ruang tersebut. Selain itu, berbagai bahan organik dan non organik telah lama tersedia dalam ruang-ruang banyak fakta pemanfaatan sumber daya Alam (SDA) seperti spesies tanaman bunga telah digunakan sebagai bahan makanan, pakaian, perlindungan, dan

menjaga kesehatan; spesies biji-bijian, akar, sagu, dll telah digunakan sebagai sumber karbohidrat; spesies bambu untuk konstruksi bangunan; spesies tanaman digunakan sebagai obat tradisional; hewan untuk sumber protein, bahan obat, kosmetik dan lain-lain; kurang lebih 250 bahasa sebagai alat komunikasi menunjukkan ekoefisiensi oleh masyarakat asli Papua dalam memahami nominalisme takson (parataksonomi). Banyak kursi tamu, karyawan dan kursi pejabat mungkin dibuat dari kayu yang berasal dari hutan yang rusak. Pantai, sungai, tepi jalan dan tepi hutan dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Sungai dimanfaatkan untuk membuang insektisida berlebihan, limbah, membangun perkebunan, membangun perumahan, dan sebagainya. Bahkan pemanfaatan sebagai sarana pendidikan dan penelitian. ruang tersebut dan berinteraksi dengan kehidupan.

Ekofisiensi Ciri Pembangunan Berkelanjutan

Tanah Papua ibarat MAMA KANDUNG. Sebenarnya seluruh manusia yang hidup di atas Tanah Papua tidak membutuhkan banyak kemampuan otak untuk melakukan tugas-tugas sederhana menjaga dan merawat mama kandungnya. Bukannya sangat sederhana?

Ancaman kerusakan terbesar terhadap MAMA KANDUNG, dari mana saja? Perusahaan-perusahaan izin eksploitasi. Sebaliknya ancaman dari masyarakat sangat kecil namun justru mereka sedang menghadapi permasalahan kemiskinan yang ekstrim.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 capaian sebagai agenda pembangunan dunia hingga Tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Sangat ambisius dicanangkan negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi SDGs melalui Inpres Nomot 6 Tahun 2017 sehingga pemerintah Provinsi Barat perlu mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan itu di atas tanah ini, Tanah Papua. Pembangunan berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan SDA untuk mendukung kesejahteraan anak cucu kita pada masa depan. Provinsi Papua Barat dalam memanfaatkan SDA yang dikandungnya, perlu berdasar pada prinsip EKOEFISIENSI, artinya 'TIDAK MERUSAK ALAM, PENGAMBILAN SECARA EFISIEN dan TELADAN LINGKUNGAN'. Konsep ini sangat mudah dipraktikkan karena hanya urusan merawat MAMA KANDUNG di rumah kita sendiri.

Ancaman global warming telah kita rasakan saat ini. Sudah saatnya manifestasi ekologi non antroposentris dibumikan bagi seluruh



Ketam kenari telah menggunakan sampah plastik sebagai rumahnya. Dimasa depan mungkin anak cucu kita juga akan mengikuti jejak ketam kenari karena saat ini kita sangat boros menggunakan ruang yang kita pinjam dari anak cucu kita.

manusia yang hidup di atas Tanah Papua. Populasi manusia yang kian bertambah di pundak MAMA KANDUNG kita, Tanah Papua, mestinya tidak menambah pembukaan dan penggunaan ruang saat ini. Sangat cepat dan terkesan pemborosan penggunaan ruang bagi manifestasi antroposentris. Beban lingkungan bagi MAMA KANDUNG menjadi semakin besar akibat penggunaan ruang "dipaksa" hingga melampaui kapasitas daya dukungnya. Ekofisiensi merupakan ciri pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Ekofisiensi wajib didorong dalam semua aspek pembangunan di Tanah Papua sebagai manifestasi ekologi non antroposentris. Ekofisiensi adalah kunci pintu rumah bagi MAMA KANDUNG kita, Tanah Papua.

Pemikiran Etis

Seluk beluk kehidupan spesies dalam biosfer kita memiliki karakteristik masing-masing. Dalam hal ini satu spesies tidak kalah pentingnya dengan spesies yang lainnya karena mereka

saling berinteraksi untuk tujuan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh manusia dalam menjaga kehidupan spesies dalam biosfer ini adalah melestarikan habitat mereka. Tentunya semua bagian teresterial hutan sebagai tempat hidup spesies wajar dipandang sebagai kawasan penting yang dapat mendukung seluruh seluk beluk hidup mereka sehingga harus dipertahankan kelestariannya. Sintesis dan review menyeluruh terhadap ekosistem dan habitat dinilai penting dalam menjaga keanekaragaman hayati Papua wajib mempertimbangkan cakupan home range, feeding behavior, dan juga kemampuan migrasi spesies dalam koridor ekosistem dan habitat.

Ekosistem merupakan komunitas hewan dan tumbuhan bersama unit lingkungan fisik yang inseparable atau interdependent (proses ekologi antara komponen biotik dan abiotik). Telah teridentifikasi sebanyak 37 ekosistem teresterial dengan total luasan 9.815.298.80 Ha termasuk 87 DAS di seluruh wilayah teresterial Provinsi Papua Barat. Identifikasi ini cukup jelas dan memberikan alasan yang kuat bahwa ekosistem-ekosistem yang berada di luar kawasan lindung perlu dikelola secara baik sebagai kekayaan alam Papua Barat yang penting dilestarikan agar kestabilan bentang alam yang luas tetap terjaga.

Idealnya 37 ekosistem yang telah teridentifikasi tidak boleh punah akibat pembukaan hutan untuk tujuan pembangunan.

Asumsi dapat dibangun bahwa setidaknya 30%-50% dari total ekosistem yang ada di luar kawasan-kawasan lindung harus dipertahankan keutuhan dan konektivitasnya untuk mengakomodir kelestarian keanekaragaman genetik plasma nutfah di Tanah Papua.

** Penulis adalah Dosen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua dan Dosen Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarja Universitas Papua*

Menjaga Sagu Menjaga Hidup

(Konsep Konservasi Kelompok Etnik Emeyode di Kampung Tarof Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat)

Oleh : Adolof Ronsumbre, S.Sos.,M.A



Kelompok Etnik Emeyode Di Kampung Tarof Distrik Kokoda Sorong Selatan (Dok. Adolof Ronsumbre, 2016).

Deskripsi

Sebuah ungkapan kuno kelompok etnik Maya di Benua Amerika, demikian bunyinya: Jika ikan terakhir yang manusia tangkap, jika air kali terakhir yang manusia minum, dan jika pohon terakhir yang manusia tebang, maka pada akhirnya manusia baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.

Ungkapan di atas, barangkali dalam bayangan pemikiran kita, itu ungkapan kuno, itu ungkapan masa lalu, dan itu ungkapan di benua Amerika. Tetapi ungkapan tersebut bisa menjadi refleksi bagi kita, karena masih relevan dalam konteks modern, sebagai ungkapan yang memberi sinyal bahwa pentingnya menjaga sumber daya alam untuk menjaga eksistensi manusia di planet bumi, karena alam menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia.

Pengetahuan dan kesadaran akan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, sudah ada sejak eksistensi manusia di bumi.

Pengetahuan konsep konservasi kelompok etnik usianya sama dengan usia eksistensi manusia di bumi. Fakta ini dilandasi oleh keyakinan dasar bahwa eksistensi kelompok etnik di bumi, mendahului eksistensi agama dan pemerintah.

Warisan tentang pengetahuan konsep konservasi, masih bisa ditemukan pada salah satu kelompok etnik di Provinsi Papua Barat, yaitu kelompok etnik Emeyode. Siapa kelompok etnik Emeyode? dan bagaimana konsep konservasi tradisional mereka?

Siapa Kelompok Etnik Emeyode

Kelompok etnik ini menyebut diri mereka sebagai orang Emeyode. Wilayah pemukiman kelompok etnik Emeyode adalah Kampung Tarof Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Marga-marga di Kampung Tarof adalah: marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugya dan Derago.

Secara etimologi istilah emeyode terdiri

dari dua kata Eme dan Yode. Eme artinya mari, sementara yode artinya kita jalan. Jadi, emeyode artinya mari kita jalan. Dalam konteks emeyode dimaknai kelompok etnik emeyode yang terdiri dari 5 marga, mari jalan tetapi bukan jalan sendirian, tetapi jalan bersama-sama. Artinya, lima marga harus jalan bersama-sama.

Nilai kebersamaan atau semacam nilai kolektifitas yang terkandung dalam penamaan kelompok etnik Emeyode, merupakan inspirasi penamaan yang bersumber dari tumbuhan sagu. Artinya, pertama kali leluhur kelompok Emeyode menginjakkan kaki di wilayah yang tak bernama ini, pemandangan semula adalah tumbuhan sagu yang melimpah. Tumbuhan sagu tumbuh dalam satu wilayah yang luas, tumbuh bersamaan dalam rumpun atau semacam kelompok. Dalam pengataan lain, tumbuhan sagu tumbuh dalam wilayah yang sama, dan menetap dalam wilayah tersebut. Artinya, kelompok tumbuhan sagu menetap dan tidak berjalan.

tumbuh bersamaan dalam rumpun atau semacam kelompok. Dalam pengataan lain, tumbuhan sagu tumbuh dalam wilayah yang sama, dan menetap dalam wilayah tersebut. Artinya, kelompok tumbuhan sagu menetap dan tidak berjalan.

Pengetahuan Tradisional: Konsep Konservasi

Kabupaten Sorong Selatan, memiliki hutan sagu terluas di Provinsi Papua Barat. Tutupan lahan di atas hutan sagu dominan tersebar di 8 distrik dengan luas 311.591 ha. Ketersediaan sagu yang melimpah di alam, menjadikan kelompok etnik Emeyode memilih mata pencaharian sebagai penokok/peramu sagu dan sekaligus sagu sebagai sumber makanan pokok tradisional. Sagu yang tumbuh di alam, sistem pembagiannya didasarkan pada kepemilikan kolektif marga. Setiap marga memiliki dusun-dusun sagu. Batas-batas dusun sagu antar marga dipahami benar oleh setiap marga. Secara tradisional batas dusun sagu antar marga ditanami jenis sagu mola (pohon sagu tidak berdurip) sebagai tanda batas dusun sagu antar marga.

Pengelolaan sagu diserahkan menjadi urusan kolektif marga. Oleh sebab itu, demi kepentingan pengaturan dusun sagu, setiap marga memilih dan mengangkat seseorang sebagai kepala urusan dusun sagu yang dalam istilah lokal disebut kepala dusun. Pengetahuan tentang sagu yang baik, dapat terlihat dari istilah-istilah lokal tentang sagu. Dalam istilah lokal sagu disebut como. Serat sagu yang agak kasar disebut apota diisi dalam wadah yang disebut noken. Wadah atau tempat untuk mengisi serat sagu yang masih kasar untuk diperas disebut waya. Selanjutnya wadah untuk memeras sagu dibuat dari pelepah sagu yang dalam istilah lokal disebut wayi. Dalam wadah tersebut dipasang kain saringan yang dalam istilah lokal disebut nurita. Sementara tepung sagu dalam istilah lokal disebut kopia, yang telah mengendap diisi dalam noken atau dalam anyaman daun sagu yang dibuat berbentuk kotak. yang dalam istilah lokal di sebut keiyate.

Pengetahuan tradisional orang Emeyode mengajarkan bahwa larangan untuk menebang pohon sagu hanya untuk mengonsumsi pucuknya. Karena pucuk pohon sagu yang akan dikonsumsi itu hanya satu, sementara anakan yang akan keluar dari akar pohon itu lebih dari satu, membentuk rumpun atau yang dalam istilah lokal disebut emagumo. Oleh sebab



Tumbuhan Sagu Milik Kelompok Etnik Emeyode di Distrik Kokoda (Foto Adolof Ronsumbre, 2016)

itu, menebang satu pohon (como) itu secara tidak langsung, berarti tidak menjaga kelestarian dan keberlanjutan sagu bagi generasi berikut. Pengetahuan tradisional tentang sagu tertanam dalam alam pikiran kelompok etnik Emeyode karena merupakan warisan leluhur antar generasi. Kelompok etnik Emeyode tidak bisa dipisahkan dengan sagu. Pertanyaannya mengapa kelompok Emeyode tidak bisa dipisahkan dengan sagu? Apa hubungan orang Emeyode dengan sagu?

Hasil studi Antropologi Ekologi dengan pendekatan Ekologi Budaya dalam bukunya yang berjudul *Theory of Culture*, Julian Steward (1955), mengatakan bahwa, hubungan antara manusia dengan lingkungan (sagu) tidaklah secara langsung melainkan ada perantara yaitu nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan yang membentuk suatu pola budaya. Pertanyaannya, apa nilai-nilai budaya tumbuhan sagu bagi etnik Emeyode? Apa wujud nilai-nilai budaya sagu yang membentuk pola/ pedoman perilaku etnik Emeyode?

Pertama, Sagu adalah pemberian. Konsep sagu adalah pemberian ditelusuri melalui mitos migrasi etnik Emeyode. Dikisahkan bahwa pada waktu lampau kelompok etnik Emeyode hidup berpindah-pindah karena adanya ancaman perang hongri.

Usaha mencari keselamatan dilakukan dengan menyisir laut. Leluhur Emeyode tertarik dengan wilayah Kokoda (kampung Tarof) karena banyaknya tumbuhan sagu dan wilayah tersebut tak berpenghuni. Keputusan leluhur memilih kampung Tarof menjadi pemukiman hingga mewariskan wilayah tersebut kepada generasi masa kini.

Karena sagu adalah pemberian, maka

sagu harus dijaga. Menjaga sagu berarti menjaga hidup, karena menjaga warisan leluhur. Untuk menjaga dusun sagu, di serahkan kepada kolektif marga-marga.

Kedua, mitos sejarah kelompok etnik. Sagu yang tumbuh dalam bentuk kelompok atau rumpun, meskipun sagu tidak jalan tetapi sagu selalu ditanam berkelompok. Fenomena tersebut menjadi inspirasi penamaan kelompok etnik emeyode.

Refleksi Antropologi Budaya

Sampai saat ini, tumbuhan sagu masih terjaga dan memang dipelihara oleh kelompok etnik emeyode di kampung Tarof Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan. Menjaga dan melindungi sagu inilah yang disebut sebagai konsep konservasi tradisional. Konsep konservasi dikonstruksi kelompok etnik Emeyode karena ada hubungan antara kelompok etnik Emeyode dengan tumbuhan sagu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan etnik Emeyode dengan tumbuhan sagu adalah (nilai pemberian, dan mitos kelompok etnik). Sepanjang nilai-nilai konservasi tradisional masih dipraktekkan, ini mengindikasikan bahwa konsep konservasi versi tradisional masih yang terbaik.

**Penulis adalah Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua*

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Terlaksananya Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018 di Manokwari, Papua Barat 7-10 Oktober 2018”





Hinocofu, Ular Berbisa dari Keluarga Elapidae

Tahukah anda bahwa Ular putih (*Micropechis ikaheka*) atau yang dengan nama lokal suku Arfak Manokwari dikenal dengan nama Hinocofu adalah salah satu jenis ular berbisa dari family Elapidae (ular berbisa terrestrial). Jenis ular berbisa lainnya yang berasal dari family Elapidae adalah jenis ular kobra (*Naja naja*), king kobra (*Ophiophagus hannah*), mamba (*Dendroaspis sp.*), taipan (*Oxyuranus sp.*) dan ular death adders (*Acanthopis antarcticus*).

Secara taksonomi Menurut O'Shea (1996) kedudukan ular putih (*M. ikaheka*) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Reptilia
 Ordo : Squamata
 Subordo : Serpentes
 Famili : Elapidae

Kelompok jenis ular dari family Elapidae merupakan kelompok ular berbisa yang sangat mematikan disamping famili Viperidae dan Hydrophidae.

Ular dari famili Elapidae dan lainnya dilengkapi dengan taring yang pendek dan kokoh pada rahang atas bagian depan, mempunyai bahan racun saraf atau neurotoksin dan bahan racun darah atau haematoksin (O'Shea 1996). Neurotoksin merupakan suatu toksin yang berperan secara spesialisasi pada sel syaraf-neuron, sedangkan haematoksin bekerja pada sel darah. Pada umumnya (neurotoxin) saling berinteraksi dengan protein membran dan kanal ion. Banyak dari bisa (sengitan) dan toksin lain digunakan organisme dalam pertahanan melawan hewan lain. Suatu efek umum adalah kelumpuhan yang ekstrim dan sangat cepat.



Penyebaran: ular *M. ikaheka* di Papua menurut Rooij (1917) adalah di Manokwari (Pulau Mansinan, Gunung Arfak, Andai), Pulau Yapen, Waropen, Sorong, Fak Fak, Mimika dan Sungai Lorentz, Pulau Numfor (Pulau Mios Noom) dan beberapa tempat lainnya.

Selanjutnya O'Shea (1996) menambahkan daerah penyebaran ular *M. ikaheka* meliputi beberapa wilayah di daratan utama (mainland) dan beberapa pulau di utara dan tenggara Papua sampai Papua New Guinea.

Studi Potensi Komoditas Unggulan Provinsi Papua Barat



Sektor pertanian dalam arti luas, yang mencakup subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah kekayaan sumberdaya hayati (renewable resources) yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari status Papua Barat sebagai provinsi miskin. Pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting karena sekitar 60% masyarakat Papua Barat hidup dan menguasai sumberdaya hayati. Akan tetapi, sejauh ini kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil dibanding sektor pertambangan.

Di sisi lain dukungan pembiayaan pembangunan melalui APBD, APBN dan Otsus cukup memadai. Sementara itu, terkait dengan tingginya kekayaan keaneragaman sumberdaya hayati, ekosistem, dan kekhasan budaya (kearifan

lokal) yang dimiliki, maka Papua Barat berproses untuk menetapkan diri sebagai provinsi konservasi. Fakta ini mengharuskan penerapan prinsip konservasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua Barat agar pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan secara berkelanjutan (lestari).

Keseluruhan fakta diatas menuntut perlunya re-orientasi paradigma pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pertanian dalam arti luas (pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) di Papua Barat. Untuk ini, sangat diperlukan adanya percepatan pembangunan melalui pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki, berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan syarat harus memperhatikan aspek kelestariannya agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat

Papua Barat secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan implementasi pembangunan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah perlunya dukungan data dan informasi komoditas unggulan di Papua Barat. Komoditas unggulan memiliki dimensi keunggulan komparatif dan kompetitif. Suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan komparatif jika komoditas tersebut berproduksi baik di suatu wilayah/zona (layak/sesuai secara teknis) dan menguntungkan secara ekonomi (layak secara ekonomi). Sedangkan keunggulan kompetitif bermakna bahwa komoditas tertentu dari suatu wilayah memiliki harga yang jauh lebih baik di pasar perdagangan komoditas dibanding komoditas yang sama dari tempat lain. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa komoditas tersebut memiliki kelayakan finansial yang tinggi di pasar.

Dengan demikian, pengelolaan komoditas unggulan secara tepat dapat menjamin: (i) kelestarian pemanfaatan sumberdaya karena memiliki kelayakan teknis dan ekonomis, (ii) efektivitas, efisiensi, dan akselerasi karena alokasi sumberdaya modal akan dialokasikan pada aspek tertentu yang teridentifikasi sebagai titik unkit terkuat/utama, dan (iii) terjadinya sinergi dan integrasi program dan anggaran dari berbagai instansi terkait yang juga menjamin efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan daerah.

Kajian pemetaan komoditas unggulan di Papua Barat telah dilakukan melalui pendekatan survey lapangan dan diskusi tim pakar Balitbangda, UNIPA, dan BPTP Papua Barat dengan para pihak di tingkat provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota menggunakan empat belas (14) variabel dalam pilar kelayakan teknis, ekonomis dan sosial budaya yang dikembangkan oleh Bappenas.

Studi ini berhasil memetakan komoditas unggulan dari subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan di setiap Kabupaten/Kota di Papua Barat. Dan strategi yang harus dilaksanakan guna mempercepat dan meningkatkan daya saing komoditas dan tingkat kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Setiap komoditas menduduki peringkat satu hingga lima berdasarkan tingkat kontribusi faktor-faktor yang menjamin tingkat kelayakan teknis, ekonomis, dan sosial budaya. (Dok. BALITBANGDA PB)



Kampung Mayaifun, Rajaampat (Foto: Econusa)



Salah satu sudut kota Kaimana, Papua Barat yang indah (Foto: Moch Fikri/Econusa)

Rakornas Kalitbangan Kemendagri

Palangka Raya, 15-17 Maret 2017



Paradigma Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi Daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam penerapannya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang Daerah diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang Litbang guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadikan Badan Litbang memiliki peran strategis, yang diharapkan mampu melakukan proses Litbang yang berkualitas demi terciptanya inovasi-inovasi dalam percepatan pembangunan pada sektor unggulan.

Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan Rakornas Kelitbangan Pemdagri Tahun 2017 adalah mewujudkan tugas dan fungsi perangkat Litbang Daerah dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pengarusutamaan inovasi di daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah:

Pertama, Berbagi informasi antara Balitbang Kemendagri dan Balitbangda serta Kementerian/Lembaga terkait; kedua, mewujudkan lembaga Kelitbangan think tank kebijakan pemerintah pusat dan daerah

Rekomendasi yang dihasilkan:

Pertama, Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Litbang Kemendagri, dapat dikategorikan dalam beberapa kondisi yaitu:

Untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan lintas pemangku kepentingan, Badan Litbang kemendagri melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi terbaik, antara lain:

- Evaluasi implementasi PP No.18/2016 terkait pembentukan kelembagaan litbang daerah.
- Inpassing Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Permen PAN-RB No.26/2016.
- Penetapan RPP tentang Inovasi Daerah.
- Sinergi lintas K/L dalam penguatan lembaga litbang daerah dan upaya untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

1. Untuk hal-hal yang bersifat penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, program dan inovasi daerah, Badan Litbang Kemendagri tetap berkomitmen untuk mendorong penguatan kapasitas dimaksud baik melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh APBN dan sumber-sumber lainnya, maupun yang dilakukan oleh daerah melalui pendanaan APBD. Kegiatan yang akan dilakukan dapat berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, rapat koordinasi, konsultasi, dan sebagainya.



2. Terkait dengan langkah-langkah penyempurnaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, akan dilakukan pencermatan lebih lanjut dengan regulasi terkait lainnya seperti PMK No.106/2016 dan Permenristekdikti No.69/2016, sekaligus mengakomodir masukan daerah dalam sidang komisi.

Kedua, Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat litbang daerah provinsi dan kabupaten/kota, agar dapat dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah

disepakati dalam Rakornas ini, khususnya terkait dengan implementasi Permendagri No.17/2016 yang berdampak pula pada perlunya penguatan kapasitas SDM kelitbangan, serta mendorong hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada inovasi daerah.

Namun demikian, terdapat pula beberapa rekomendasi yang menjadi komitmen bersama yang telah disepakati dalam masing-masing sidang komisi, antara lain:

- Pembangunan basis data pusat dan daerah melalui pemetaan maupun aplikasi terkait kegiatan kelitbangan dan inovasi.

- Kolaborasi pelaksanaan pengkajian nasional tentang isu-isu strategis nasional yang topiknya akan dibahas dalam forum tersendiri.

- Penyusunan Rencana Aksi Inovasi Daerah.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Demikian pokok-pokok hasil rumusan sidang komisi yang menjadi rekomendasi Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan komitmen kita bersama guna diimplementasikan sesuai dengan kewenangannya.



Penetapan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat

Kunci Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Papua Barat

Oleh : Nita Yohana dan Elisa Lesnusa



Penetapan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat mengesahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Pembangunan Berkelanjutan. Pengesahan itu ditetapkan dalam agenda rapat paripurna masa sidang 1 tahun 2018/2019 dalam rangka persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah Non-APBD 2019.

Inisiatif Perdasus Pembangunan Berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 2015 dengan dibentuk Pokja Provinsi Konservasi melalui Keputusan Gubernur Papua Barat No: 522.5/123/6/2015 (30 Juni 2015) tentang Pembentukan Kelompok Kerja Provinsi Papua Barat (POKJA PK). POKJA bekerja secara intensif sejak bulan

September 2015 dengan tugas utama merumuskan dan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perdasus Papua Barat sebagai Province Konservasi. Pada tanggal 19 Oktober 2015 dilakukan Deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi oleh Gubernur dengan para Bupati/Walikota se Papua Barat, yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan para tokoh masyarakat Papua Barat. Desember 2016, POKJA telah menghasilkan draf naskah akademik dan rancangan perdasus Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Sejak pertengahan 2017, penyelesaian perdasus ini dilanjutkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) dan lewat serangkaian pembahasan dengan Pemerintah Pusat, judul Raperdasus kemudian diubah menjadi "Raperdasus Pembangunan Berkelanjutan

di Provinsi Papua Barat". Sebagai salah satu usaha pelaksanaan Raperdasus ini, Pemda Papua Barat dan Mitra Pembangunan Papua Barat dan Papua telah melaksanakan dalam Internasional Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018 di Tanah Papua pada bulan Oktober 2018. Salah satu hasil ICBE 2018 adalah Deklarasi Manokwari, yang memuat 14 komitmen pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Perdasus Pembangunan Berkelanjutan ini adalah payung, untuk selanjutnya diterjemahkan dalam rencana pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mengadopsi pembangunan berkelanjutan dalam rencana kerja. Disamping itu, para shareholder utama di Pemerintah Papua Barat akan mendorong rencana strategi

dan rencana aksi baik untuk jangka pendek dan panjang sebagai dokumen tindak lanjut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Apa itu Perdasus Pembangunan Berkelanjutan?

Kebijakan inisiatif Pembangunan Berkelanjutan dilatarbelakangi oleh Papua Barat diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa melimpah, diantaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta gletser tropis. Keanekaragaman hayati Tanah Papua adalah setengah dari total jumlah keanekaragaman hayati Indonesia, secara khusus flora dan fauna endemik yang hanya dijumpai di Tanah ini. Tidak hanya itu, Tanah Papua juga kaya akan sumberdaya alam berupa bahan tambang miberagaman gas dan mineral serta budaya adat istiadatnya, tercatat sekitar 265 bahasa lokal yang melambangkan kesuku-suku yang ada dengan kearifan lokalnya.

Seiring dengan perkembangan wilayah, penyelenggaraan pembangunan di Papua Barat menghadapi banyak tantangan. Arus modal dan industrialisasi yang berkembang sangat cepat sebagai akibat dari tuntutan pembangunan telah mengancam kelestarian sumberdaya alam baik yang ada didarat maupun di perairan dan bahkan juga mengancam hak-hak masyarakat adat. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan kekayaan alam dan sosial budaya tersebut dapat dilindungi dan dilestarikan. Inisiatif kebijakan Pembangunan Berkelanjutan adalah kesempatan untuk menetapkan sebuah paradigma pembangunan berkelanjutan yang baru, sebuah jalur kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan peluang dan mengurangi resiko. Hal itulah yang menjadi alasan kuat untuk inisiatif Pembangunan Berkelanjutan. Inisiatif Pembangunan Berkelanjutan bukan satu-satunya cara, tetapi merupakan salah satu cara dan kesempatan untuk menetapkan strategi pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan menyeimbangkan pengelolaan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersama-sama. Filosofi konservasi adalah menjaga keseimbangan hidup manusia terhadap alam, dimana konteks pembangunan berkelanjutan akan mengakomodir seluruh bidang kehidupan.

Dalam Perdasus Pembangunan Berkelanjutan terdapat 4 prinsip utama yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan yang mencakup:

1. Perlindungan lingkungan hidup demi menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat Papua Barat dan kehidupan umat manusia pada umumnya.
2. Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati demi menjamin keseimbangan ekologi dan kelangsungan proses-proses kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan demi menjamin kualitas kehidupan generasi mendatang; dan
4. Pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan ekosistem penting yang telah terdegradasi.

Sedangkan kebijakan kunci yang dituangkan dalam Perdasus Pembangunan Berkelanjutan ini adalah :

1. Memastikan kesejahteraan masyarakat Papua dengan menetapkan landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang mengakui dan memelihara modal alam sekaligus mendukung masyarakat adat.
2. Melindungi hak-hak adat atas sumber daya alam, untuk mendukung mata pencaharian berbasis sumber daya dalam jangka panjang
3. Pengembangan industri yang selaras dengan visi Provinsi Konservasi, dimana industri ekstraktif atau pembangunan skala besar menerapkan cara terbaik prinsip-prinsip keberlanjutan
4. Keanekaragaman hayati global yang signifikan dilindungi dan dilestarikan melalui mekanisme formal dan informal. Pengelolaan keanekaragaman hayati (termasuk spesies endemik, terancam, dan karismatik dengan nilai wisata) juga mempertimbangkan dan menjawab perubahan iklim, serta melindungi cadangan karbon
5. Melindungi lingkungan laut dan muara melalui sebuah jejaring Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang efektif dan multiguna, yang secara strategis terkait dengan ekosistem daratan dan perairan dan pengelolaan perikanan pesisir yang baik dalam mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Manfaat Perdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk sumber daya alam dan masyarakat di Papua Barat.

Melalui Perdasus Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah daerah, masyarakat adat dan para pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati baik di darat atau pun di laut terjaga kelestariannya. Sumber daya alam di Papua Barat akan dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan demi kehidupan generasi mendatang. Kebijakan ini juga termasuk memperdayakan orang asli Papua melalui perlindungan hak-hak atas sumber daya alam dan penyediaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan luasan wilayah 140.376 km² dan tercatat sekitar 265 bahasa lokal dan merupakan rumah bagi 870.000 orang, serta masyarakat sangat bergantung kepada sumber daya alam sebagai penghidupan, maka Pengesahan Perdasus Pembangunan berkelanjutan adalah kemenangan atas hak sumber daya alam di Papua Barat.

Perdasus Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan pelaksanaan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang berisi 17 tujuan (goals) dan 169 sasaran (targets), dimana keanekaragaman hayati mendapat perhatian serius terutama pada tujuan 14 dan 15. Sebagai bagian dari masyarakat global yang telah bersama-sama berkomitmen untuk mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kesejahteraan umat manusia. Perdasus Pembangunan Berkelanjutan juga membantu pemerintah Indonesia yang berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030. Selain itu, juga menjadi bentuk dukungan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

* Penulis Bekerja pada Yayasan EcoNusa dan Sekretariat Mitra Pembangunan Papua Barat

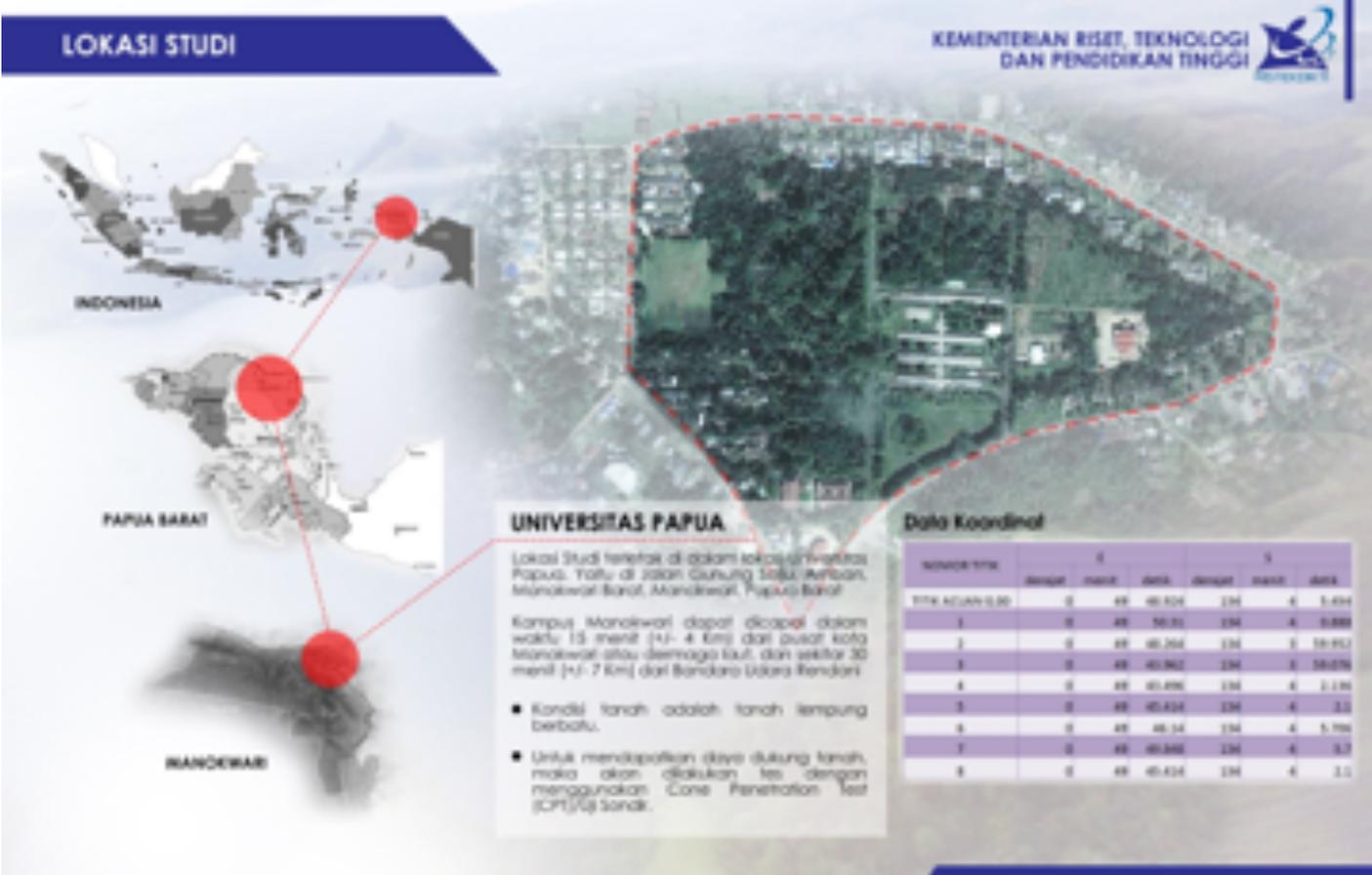
** Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

STP Papua Barat

LOKASI STUDI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS PAPUA

Lokasi Studi terletak di dalam lokasi Universitas Papua. Yaitu di jalan Gunung Sagu Arifian, Mandowari Barat, Mandowari, Papua Barat

Kampus Mandowari dapat dicapai dalam waktu 15 menit (+/- 4 km) dari pusat kota Mandowari atau demaga laut, dan sekitar 30 menit (+/- 7 km) dari Bandara Udara Rendani

- Kondisi tanah adalah tanah lempung berbatu.
- Untuk mendapatkan daya dukung tanah, maka akan dilakukan tes dengan menggunakan Cone Penetration Test (CPT)/q sondak.

Data Koordinat

Nomor titik	1		2			
	Amplitudo	Waktu	Amplitudo	Waktu		
Titik ACUAN 0.00	0	49	49.824	234	4	3.894
1	0	49	50.85	234	4	3.888
2	0	49	49.264	234	3	38.952
3	0	49	49.942	234	3	38.076
4	0	49	49.496	234	4	2.136
5	0	49	49.434	234	4	3.32
6	0	49	48.34	234	4	5.760
7	0	49	49.888	234	4	3.3
8	0	49	49.434	234	4	3.3

IDENTIFIKASI LOKASI STUDI



PT GADISA NEERWA ADDING KONSULTAN
Jl. Satek Mandowari Mandowari Kabupaten Mandowari
Provinsi Papua Barat

STP (Science Techno Park) dibangun sebagai wahana hilirisasi IPTEK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pemerataan antar Wilayah.

Outcomes yang diharapkan dari pembangunan STP adalah: perekonomian lokal meningkat, terbangunnya sistem pertanian terpadu di kabupaten/kota, terbangunnya ekosistem perekonomian berbasis pertanian, terbangunnya klaster industri berbasis inovasi.

Konsep organisasi STP Papua Barat Organisasi SP terdiri dari dua institusi, yaitu Pemerintah Daerah Papua Barat dan Universitas Papua. Agar pengelolaan lembaga dapat dilakukan secara profesional, maka dalam implementasi dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Kegiatan SP yang bersifat teknis, dipegang oleh tim dari Universitas Papua
Kegiatan SP yang bersifat administratif, dipegang oleh tim dari Pemerintah Daerah Papua Barat

Berdasarkan tujuan, luaran dan posisi strategis STP bagi daerah, Pemerintah Pusat melalui Kemristek dikti menginisiasi pembentukan STP di Papua. Dari aspek kesiapan daerah dan ketersediaan inovasi dari perguruan tinggi/lembaga litbang, selanjutnya ditetapkan di Provinsi Papua Barat. Rencana tersebut ditindaklanuti melalui pertemuan antara tim Kemenristekdikti dengan Bappeda Provinsi Papua Barat pada tanggal 22 Mei 2015, yang menghasilkan pernyataan dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan STP di Provinsi Papua Barat.

Bentuk dukungan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pengembangan STP Papua Barat berupa: kemudahan perijinan

dan kelembagaan, penyediaan lahan dan prasarana pendukung, penyiapan konsep dan masterplan (termasuk bentuk kelembagaan/organisasi STP), dukungan program, serta penguatan jejaring di daerah (dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sebagainya).

Pada pertemuan-pertemuan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) berikutnya juga disepakati bahwa bentuk organisasi STP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Balitbangda Provinsi Papua dengan konten lokal yang diangkat adalah sagu, hasil hutan dan hasil perikanan/laut. Terkait dengan itu, pembentukan STP Papua Barat juga selaras dengan misi Gubernur Papua Barat Periode 2017-2022, yaitu: (1) meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah; (2) membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat; (3) membangun perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing.

Inisiasi dan pengembangan STP Papua Barat telah dimulai sejak Tahun 2015 melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas calon pengelola STP. yang diperlukan dalam pengembangan

STP Papua Barat berupa: kemudahan perijinan dan kelembagaan, penyediaan lahan dan prasarana pendukung, penyiapan konsep dan masterplan (termasuk bentuk kelembagaan/organisasi STP), dukungan program, serta penguatan jejaring di daerah (dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sebagainya). Pada pertemuan-pertemuan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) berikutnya juga disepakati bahwa bentuk organisasi STP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Balitbangda Provinsi Papua dengan konten lokal yang diangkat adalah sagu, hasil hutan dan hasil perikanan/laut. Terkait dengan itu, pembentukan STP Papua Barat juga selaras dengan misi Gubernur Papua Barat Periode 2017-2022, yaitu: (1) meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah; (2) membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat; (3) membangun perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing.

Inisiasi dan pengembangan STP Papua Barat telah dimulai sejak Tahun 2015 melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas calon pengelola STP. Untuk penguatan kelembagaan STP

Papua Barat, pada Tahun 2017 dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) STP Papua Barat oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat yang bertugas untuk menyiapkan kelembagaan tetap STP yang nantinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Selain itu Pokja tersebut berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan STP di Papua Barat. Pokja yang dibentuk tersebut terdiri dari Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, UNIPA, STPP, BPTP dan dari pihak swasta.

Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok Kerja STP Papua Barat melaksanakan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan rencana kerja dan Master Plan Pengembangan STP Papua Barat yang telah disusun pada Tahun 2016. Kegiatan STP Papua Barat Tahun 2017 dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan: Bidang Kelembagaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Bidang Lainnya. Sumber pendanaan kegiatan STP Papua Barat Tahun 2017 berasal dari Kementerian Ristek Dikti dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda Papua Barat, setelah terbentuk Balitbangda sebagai OPD baru yang menangani penelitian dan pengembangan di daerah.



Areca Jokowi, Spesies Pinang Baru dari Papua Barat

Nama spesies Jokowi diambil dari Nama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai penghargaan atas kepemimpinan, keteladanan, jasa dan upayanya dalam memimpin Bangsa dan Negara Indonesia, terlebih perhatiannya dan kepeduliannya dalam membangun Tanah Papua.

Sejarah Penemuan

Penemuan pinang Jokowi ini berawal dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua (Puslit LH UNIPA), yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dalam menindaklanjuti laporan adanya invasi gulma air eceng gondok di perairan Danau Yamor dan DAS Omba tahun 2015. Tim selanjutnya melakukan kajian di sekitar ekosistem Danau Yamor, termasuk mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang berada di hutan dan perkampungan danau tersebut. Ketua Tim Peneliti dan sebagai otoritas dunia di bidang taksonomi pinang (*Areca*: *Arecaceae*), Profesor Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut. M.Si, FLS langsung mengenali bahwa pinang ditemukan di hutan dekat Danau Yamor ini adalah jenis baru. Dan kesempatan untuk menindaklanjuti dan dipublikasikan sebagai jenis baru secara sah (valid) kembali dilakukan dan dipercepat setelah Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat Tahun 2016 mendapat arahan untuk mengunjungi, mendokumentasikan keberadaan pinang ini di habitat alamnya dan mengoleksi spesimen untuk keperluan studi lanjut dan pembudidayaannya.

Penamaan

Profesor Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut. M.Si, FLS menyebut pinang temuan barunya dengan nama *Areca jokowi* atau pinang jokowi. Pemberian nama tersebut sebagai



penghargaan sang penemu kepada Presiden Joko Widodo yang menunjukkan kesederhanaan dan keteladanan dalam kepemimpinan serta kepeduliannya pada masyarakat Papua.

Pinang Jokowi menggunakan nama ilmiahnya secara resmi setelah nama dan deskripsinya dipublikasi atau terbit pada jurnal ilmiah internasional *Phytotaxa* volume 288 halaman 175 -180 pada tanggal 14 Desember 2016 sebagai syarat utama keabsahannya. Dengan demikian nama ilmiah pinang Jokowi adalah *Areca jokowi* Heatubun.

Taksonomi, Distribusi, dan Habitat

Pinang Jokowi sangat unik karena berbeda secara morfologis dengan jenis pinang yang telah diketahui sebelumnya dari Tanah Papua (*Areca catechu*, *A. Macrocalyx*, *A. mandacanii* dan *A. unipa*). Pinang ini berperawakan sebagai palem tunggal dan berbatang langsing (diameter 7-8 cm) dengan tinggi mencapai 15 meter. Sementara ciri paling menonjol adalah perbungaannya yang termasuk "mini" atau kecil dimensinya namun padat serta bunga betinanya memiliki calyx berwarna putih yang sangat kontras.



Pinang ini dijumpai dan tumbuh alami pada hutan perbukitan yang memiliki lapisan tanah tipis pada batuan pasir (sandstone) dengan elevasi 300 m di atas permukaan laut dekat dengan Danau Yamor di daerah Leher Kepala Burung.

Pinang ini dijumpai dan tumbuh alami pada hutan perbukitan yang memiliki lapisan tanah tipis pada batuan pasir (sandstone) dengan elevasi 300 m di atas permukaan laut dekat dengan Danau Yamor di daerah Leher Kepala Burung. Tanaman pinang ini ditemukan di lahan-lahan masyarakat di Desa Gariau (Urubika) yang masuk dalam wilayah administrative Kabupaten Kaimana di Papua Barat. Secara ekologis, Pinang Jokowi membutuhkan naungan untuk pertumbuhan awalnya dan akan membutuhkan sinar matahari penuh setelah dewasa. Dalam jurnal diinformasikan, biji pinang jokowi berasal dari hutan perbukitan Kepala Air Kali Ima di Gunung Daweri, dekat Desa Kewo yang berbatasan dengan Desa Nabire di Papua. Warga Desa Urubika mengambil biji pinang jokowi di atas perbukitan setinggi 300 meter itu, lalu ditanam di kebun warga hingga kini.

Secara etnobotani nama daerah pinang ini adalah Siaku' dalam Bahasa lokal (dialek Yamor suku Kamoro). Pemanfaatan secara tradisional sebagai bagian penting kebiasaan menyirih orang Papua yang

buahnya dikunyah bersama sirih dan bubuk kapur, layaknya pinang sirih (*Areca catechu* L.).

Status Konservasi

Terkait kondisi dan kerentanan spesies itu dari kepunahan, jurnal tersebut merekomendasikan agar dilakukan kajian lebih lanjut. Hal ini berdasarkan daerah distribusi yang terbatas, jumlah populasi yang sangat jarang dan sifat keendemikannya, maka pinang Jokowi ini termasuk jenis langka yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pelestariannya.

Penulis:

Nita Yohana
Bekerja pada Yayasan Econusa
Di Papua Barat Bekerja untuk Sekretariat Mitra
Pembangunan Papua Barat

Inisiatif Pembentukan Mitra Pembangunan Papua Barat

Latar Belakang Pembentukan Mitra Pembangunan

Setelah pelaksanaan International Conference on Biodiversity, Eco-tourism, and Creative Economy (ICBE) 2018 pada 7-10 Oktober 2018, terdapat beberapa target spesifik yang harus dicapai sebelum dan sesudah konferensi. Target tersebut juga merupakan langkah untuk mengimplementasikan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, dan meskipun beberapa target terdengar sangat ambisius, tetapi selama konferensi ada kesepakatan konsensus oleh pejabat pemerintah utama dari tingkat nasional, regional dan kabupaten sebagai pemimpin publik dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, yang sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Manokwari yang memuat 14 poin penting. Deklarasi Manokwari ini adalah pencapaian terpenting Konferensi ICBE 2018 yang diperoleh melalui dukungan politik yang lebih luas untuk Provinsi Pembangunan Berkelanjutan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk didalamnya para mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini terdiri dari lembaga, organisasi, institusi baik dari dalam dan luar negeri yang bersama-sama bekerja dan berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Sekretariat Mitra Pembangunan

Dalam penyelenggaraan ICBE 2018, terdapat peran yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah selama persiapan dan konferensi diselenggarakan dan dikelola oleh Sekretariat ICBE 2018. Tugas-tugas itu termasuk menyiapkan target konferensi, mengorganisir dan mengoordinasikan sekitar 25 Mitra Pembangunan untuk menindaklanjuti target sebelum dan sesudah konferensi. Sekretariat ICBE 2018 juga menyelenggarakan beberapa pertemuan sosialisasi dan koordinasi, baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Karena tidak semua target ICBE 2018 telah diselesaikan selama



Konferensi dan berdasarkan rekomendasi Rapat Koordinasi ke-5, maka dibutuhkan dorongan untuk memperpanjang peran Sekretariat. Untuk hal tersebutlah, Sekretariat Mitra Pembangunan Papua Barat akan menjadi wadah untuk berkoordinasi mengenai aktivitas para mitra yang dilakukan di Papua Barat.

Peran Sekretariat Mitra Pembangunan yang utama meliputi:

1. Memperkuat dan memelihara koordinasi di antara para pemangku kepentingan utama yakni OPD Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan terkait).
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan Mitra Pembangunan dengan OPD Provinsi Papua Barat terkait dan memfasilitasi koordinasi antara Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Memastikan penyelesaian target ICBE 2018.
4. Memastikan terlaksananya semua komitmen yang dibuat selama konferensi.
5. Memendorong kerja sama program antar OPD Papua Barat terkait dan Mitra Pembangunan untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.

Landasan Hukum Mitra pembangunan

Pembentukan Mitra Pembangunan Papua Barat nantinya secara legal melalui SK Gubernur Papua Barat. Proses SK tersebut telah diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat. Saat ini draf SK Mitra Pembangunan sudah dalam tahapan revisi yang selanjutnya diserahkan kepada Biro Hukum Papua Barat untuk ditelaah sebelum disahkan oleh Gubernur Papua Barat. Untuk kedepannya, setelah SK Mitra Pembangunan Papua Barat disahkan, maka akan dilakukan Rapat Koordinasi baik pada tingkat internal OPD Papua Barat, maupun koordinasi dengan Mitra pembangunan terkait yang dilakukan secara berkala.

Penulis:

Nita Yohana
Bekerja pada Yayasan Econusa
Di Papua Barat Bekerja untuk Sekretariat
Mitra Pembangunan Papua Barat



Profil Balitbangda



Keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari peran dan dukungan lembaga riset. Sebagai ujung tombak Lembaga riset diharapkan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan kajian ilmiah terhadap isu-isu strategis dan prioritas daerah untuk menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah.

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Namun potensi luar biasa tersebut belum termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari tingginya angka kemiskinan Papua Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari (selanjutnya disebut BALITBANGDA Provinsi) adalah organisasi perangkat daerah unsur penunjang pemerintahan penyelenggara

fungsi kelitbang yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbang di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dapat memberikan manfaat secara maksimal dalam proses pembangunan di daerah, dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada publik, artinya publikasi hasil litbang adalah sebuah keniscayaan.

Harapan kami yang paling besar adalah hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat menjadi dasar dan bahan acuan bagi seluruh Aparatur Pemerintah Daerah di Papua Barat dalam menyusun

program kerja dan kegiatan dalam membangun Papua Barat.

Sejarah dan Dasar Pembentukan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pembentukan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara Operasional Balitbangda Provinsi Papua Barat di mulai pada Januari 2017.

VISI & MISI

Visi

Pernyataan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, disesuaikan dengan visi Provinsi Papua Barat, yaitu:

**“Membangun dengan hati
mempersatukan dengan kasih
menuju Papua Barat yang
Aman Sejahtera dan
Bermartabat”**

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Balitbangda Provinsi Papua Barat menetapkan misi, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif

2. Mewujudkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas
3. Mewujudkan pengembangan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengembangkan potensi SDM yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 bahwa tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- Balitbangda Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balitbangda Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi.
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi.
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi.
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi.
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balitbangda Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, dan bidang pembinaan masyarakat daerah.
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis.
- Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.



